

Katalog : 7102025.51

# INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI PROVINSI BALI 2021



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BALI



# INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI PROVINSI BALI 2021



# **INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI PROVINSI BALI 2021**

ISSN : 2797-264X

No Publikasi : 51000.2223

Katalog : 7102025.51

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm.

Jumlah Halaman : xiv + 46 halaman.

Naskah : BPS Provinsi Bali.

Penyunting : BPS Provinsi Bali.

Cover : BPS Provinsi Bali.

Gambar cover : *Designed by Freepik.*

Diterbitkan oleh : ©BPS Provinsi Bali.

Dicetak Oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

**Tim Penyusun**

**Indeks Kemahalan Konstruksi**

**Provinsi Bali 2021**

Penanggung Jawab Umum:

Hanif Yahya S.Si.,M.Si

Penanggung Jawab Teknis:

I Made Agus Adnyana SE., MSE., M.Sc

Koordinator:

Ni Made Inna Dariwardani, MA., ME.

Anggota:

Putu Wira Wirbuana, SST, M.P.P

*Layout:*

Putu Wira Wirbuana, SST, M.P.P



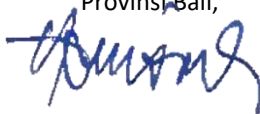
## KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 2021 merupakan hasil dari pelaksanaan Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK) yang dilakukan secara triwulanan di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Data yang dikumpulkan dalam survei tersebut mencakup harga berbagai barang dan jasa konstruksi.

Data yang disajikan dalam publikasi ini meliputi data IKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. Publikasi ini diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan data IKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2017-2021 dan merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan publikasi ini, terutama kepada perusahaan atau responden yang telah membantu kelancaran Survei Harga Kemahalan Konstruksi sehingga publikasi ini bisa diterbitkan. Semoga publikasi ini bermanfaat dan dapat memenuhi sebagian harapan pengguna data. Berbagai saran dan masukan sangat kami harapkan demi edisi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Denpasar, Juni 2022  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Bali,



**Hanif Yahya S.Si., M.Si**





# Daftar Isi

---

Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	xi
<b>Bab I:</b>	
Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Tujuan .....	5
1.3 Cakupan .....	5
1.4 Konsep dan Definisi .....	6
<b>Bab II:</b>	
Metodologi .....	9
2.1 Indeks Kemahalan Konstruksi .....	11
2.2 Paket Komoditas IKK.....	13
2.3 Diagram Timbang IKK.....	16
2.4 Dana Alokasi Umum (DAU).....	17
<b>Bab III:</b>	
Ulasan Ringkas .....	19
3.1 Gambaran Umum Provinsi Bali .....	21
3.2 Dana Alokasi Umum Provinsi Bali .....	27
3.3 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Bali .....	28
3.4 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota.....	30
Lampiran .....	xiii



## Daftar Tabel

---

Tabel 3.1. Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan di Provinsi Bali, 2021 .....	25
Tabel 3.2. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan dan Kondisi Jalan di Provinsi Bali, 2021 .....	26
Tabel 3.3. Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) di Provinsi Bali, 2021.....	27
Tabel 3.4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2021 .....	31



## Daftar Gambar

---

Gambar 3.1. Persentase Luas Wilayah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2021 .....	22
Gambar 3.2. Ketinggian Ibu Kota Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2021 .....	23
Gambar 3.3. Peta Tematik Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2021 .....	28
Gambar 3.4. Nilai dan Ranking Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Bali, 2017-2021 .....	30
Gambar 3.5. Peta Tematik Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 2021 .....	32
Gambar 3.6. Indeks Kemahalan Konstruksi dan Dana Alokasi Umum Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2021 .....	33



## Lampiran

---

Tabel 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2017 (Kota Surabaya = 100).....	37
Tabel 2. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2018 (Kota Semarang = 100). ....	38
Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2019 (Kota Semarang= 100). ....	39
Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2020 (Kota Semarang = 100) .....	40
Tabel 5. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2021 (Kota Makassar = 100) .....	41
Tabel 6. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2017 Provinsi Bali (Kota Surabaya = 100). ....	42
Tabel 7. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2018 Provinsi Bali (Kota Semarang = 100). ....	43
Tabel 8. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2019 Provinsi Bali (Kota Semarang = 100). ....	44
Tabel 9. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2020 Provinsi Bali (Kota Semarang = 100). ....	45
Tabel 10. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2021 Provinsi Bali (Kota Makassar = 100). ....	46







# BAB I PENDAHULUAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diduga membawa perubahan tersendiri terhadap pola penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan landasan tersebut, Pemerintah daerah dapat mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Desentralisasi fiskal memberi kewenangan kepada setiap daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah guna membiayai pengeluaran daerah dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan publik. Namun, disadari bahwa masing-masing daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama sehingga menimbulkan potensi ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, salah satu dana perimbangan yang dibagikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di masing-masing daerah. Terkait dengan hal tersebut, salah satu variabel yang digunakan dalam formulasi penghitungan DAU adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) disamping variabel jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kemeterian yang bertanggung jawab sebagai penyedia data statistik dasar di Indonesia melakukan penghitungan IKK sejak tahun 2002 untuk keperluan penghitungan DAU 2003 yang kemudian dilanjutkan hingga sekarang. Data IKK tersebut ditujukan untuk melihat tingkat perbandingan harga barang/jasa konstruksi antar wilayah dibandingkan dengan harga barang/jasa konstruksi pada suatu kota acuan.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 16.056 pulau (sesuai hasil forum *United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN)* dan *United Nations Group of Experts on*

*Geographical Names (UNGEEN)* yang berlangsung pada 7-18 Agustus 2017 di New York, Amerika Serikat) memiliki variasi infrastruktur baik di setiap pulau atau wilayah yang patut diduga memegang peranan dalam penentuan harga konstruksi. Dengan demikian, semakin sulit letak geografis suatu daerah dapat diduga semakin tinggi pula tingkat harga konstruksi di daerah tersebut. Perbandingan tingkat harga konstruksi antar wilayah tersebut tercermin dari indikator Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

## 1.2 Tujuan

Penyajian Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Bali 2021 dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait data tingkat kemahalan konstruksi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi Provinsi Bali dengan provinsi lainnya.

## 1.3 Cakupan

Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil pengolahan dan penghitungan hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi yang dilakukan secara triwulanan dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2017-2021.

## 1.4 Konsep dan Definisi

### 1.4.1 Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) didefinisikan sebagai suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang/jasa konstruksi antar wilayah dibandingkan dengan harga barang/jasa konstruksi suatu kota acuan.

### 1.4.2 Bahan bangunan atau konstruksi

Bahan bangunan atau konstruksi didefinisikan sebagai material yang digunakan dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan pada bagian suatu bangunan atau konstruksi yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut.

### 1.4.3 Kegiatan Konstruksi

Kegiatan Konstruksi didefinisikan sebagai suatu kegiatan meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang dicatat dalam penghitungan IKK hanya kegiatan investasi (pembangunan baru, bukan renovasi yang tidak menambah nilai aset). Hasil kegiatan konstruksi antara lain: gedung, jalan, jembatan, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, serta distribusi dan bangunan jaringan komunikasi.

#### 1.4.4 Sewa Alat Berat

Harga sewa alat berat konstruksi didefinisikan sebagai harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini merupakan sewa selama 1 bulan atau 200 jam. Harga sewa hanya biaya sewa alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek, dan juga tidak termasuk biaya jasa operator. Umur alat berat yang disewakan juga memiliki syarat batas umur maksimal 8 tahun.







# BAB II METODOLOGI



# BAB II

## METODOLOGI

### 2.1 Indeks Kemahalan Konstruksi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan angka indeks yang menunjukkan perbandingan harga bahan bangunan dan jasa konstruksi antar lokasi yang berbeda pada periode yang sama dibandingkan dengan suatu kota acuan. Lebih lanjut, IKK dapat dikatakan sebagai cerminan dari suatu nilai bangunan atau konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi dibandingkan dengan nilai bangunan atau konstruksi yang sama di suatu kota acuan.

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal dua metode penghitungan, yang pertama dengan pendekatan harga input dan yang kedua dengan pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan, digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*. Disisi lain, pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Namun, terdapat kelemahan pada pendekatan ini yaitu dalam harga bangunan sudah

termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga kurang sesuai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah. Dengan pertimbangan ini, disepakati penghitungan IKK menggunakan pendekatan harga input.

Dalam penghitungan IKK diperlukan data/komponen penunjang yaitu paket komoditas, diagram timbang, dan data harga jenis bahan bangunan yang menjadi paket komoditas penghitungan IKK. Selain itu, ditetapkan pula suatu kabupaten/kota sebagai acuan dalam penghitungan indeksnya. Penentuan kota acuan pada penghitungan IKK dilakukan dengan menentukan salah satu kabupaten/kota yang memiliki nilai IKK mendekati angka rata-rata seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK adalah untuk memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKK-nya. Pada tahun 2013 sampai 2014 Kota Samarinda digunakan sebagai kota acuan. Tahun 2015 hingga 2017 Kota Surabaya digunakan sebagai kota acuan. Tahun 2018 sampai dengan 2020 Kota Semarang yang digunakan sebagai kota acuan, sedangkan tahun 2021 Kota Makassar dijadikan sebagai kota acuan. Data harga jenis bahan bangunan dan jasa konstruksi diperoleh dari Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK). SHKK diselenggarakan secara triwulanan (bulan Januari, April, Juli, dan Oktober) setiap tahunnya pada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Untuk penghitungan IKK

tahun 2021 data yang digunakan adalah data hasil pencacahan SHKK bulan Juli 2020, Oktober 2020, Januari 2021, dan April 2021.

## 2.2 Paket Komoditas IKK

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components (BOCC)*. Pendekatan ini digunakan dalam *International Comparison Programs (ICP)* tahun 2005. Metode pendekatan ini didesain untuk keterbandingan antar wilayah.

Dalam metode *BOCC*, data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah. Komponen konstruksi merupakan output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi.

Elemen kunci dalam proses pendekatan ini yaitu semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan dengan tujuan memberikan perbandingan harga konstruksi antar wilayah yang lebih sederhana dan biaya yang murah serta dimungkinkan untuk menggunakan metode *Bill of Quantity (BOQ)* karena mempunyai bobot yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di suatu daerah. Mengacu pada pendekatan *BOCC*, paket komoditas IKK didefinisikan sebagai suatu keranjang atau paket yang terdiri dari sejumlah bahan bangunan atau konstruksi yang dominan digunakan untuk membangun satu unit bangunan

atau konstruksi. IKK dihitung menurut jenis kelompok barang/komoditas yang terdiri dari 5 (lima) jenis kelompok bangunan yaitu kelompok bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal; prasarana pekerjaan umum untuk pertanian; jalan, jembatan, dan pelabuhan; bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi; serta bangunan lainnya. Pengelompokan jenis bangunan yang dimaksud mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). Adapun klasifikasi dari masing masing jenis bangunan tersebut sebagai berikut :

- a. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal:
  1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun, dan perumahan dinas.
  2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun, dan bangunan monumental.
- b. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian:
  1. Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendung (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.
  2. Bangunan proses tempat hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan dan bangunan pengeringan.

- c. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan dan pelabuhan:
1. Bangunan jalan, jembatan, dan landasan, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu rambu lalu lintas.
  2. Bangunan jalan dan jembatan kereta, meliputi: pembangunan jalan dan jembatan kereta.
  3. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
- d. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi:
1. Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan transmisi tegangan tinggi.
  2. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
  3. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/ penerima radar *microwave*, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
  4. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.

5. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
6. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
7. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
8. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.
9. Bangunan lainnya, meliputi: bangunan sipil, pembangunan lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman.

### 2.3 Diagram Timbang IKK

Diagram timbang yang digunakan dalam penghitungan IKK tahun 2021 terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan dan diagram timbang IKK umum. Penghitungan IKK tahun 2021 menggunakan penimbang dari hasil pencacahan *Bill of Quantity (BoQ)* sampai tahun 2020. *BoQ* ini dikumpulkan dari masing-masing kabupaten/kota agar setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di wilayahnya masing-masing.



## 2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU salah satunya sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi.
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Persentase Pembagian DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebesar 10 persen dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Provinsi dan 90 persen dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Perhitungan besaran DAU secara nasional yaitu minimal sebesar 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Netto). Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama. Daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya, tergantung dari hasil hitungan komponen-komponen pembentuk DAU seperti variabel jumlah penduduk, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) per Kapita. Bahkan di beberapa daerah yang memiliki Kapasitas Fiskal sangat besar dimungkinkan untuk tidak mendapat DAU (DAU = 0).

<https://bali.bps.go.id>



# BAB III

# ULASAN RINGKAS



# BAB III

## ULASAN RINGKAS

### 3.1 Gambaran Umum Provinsi Bali

#### 3.1.1 Kondisi Geografis

Provinsi Bali tercatat sebagai salah satu provinsi kepulauan dengan luas terkecil dari 34 provinsi di Indonesia yaitu hanya seluas 5.780,06 km<sup>2</sup> (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019) dan berada di antara Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, Provinsi Bali terletak di antara Samudera Indonesia dan Laut Bali, masing-masing di bagian selatan dan utara serta Selat Bali dan Selat Lombok di bagian barat dan timurnya

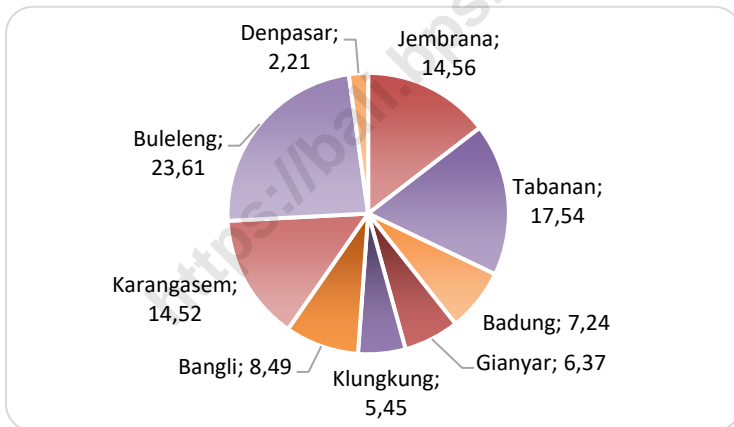
Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 08°03'40" – 08°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" – 115°42'40" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis layaknya wilayah lain di Indonesia. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Bali sebagai berikut :

- Batas utara dengan Laut Bali.
- Batas selatan dengan Samudera Hindia.
- Batas barat dengan Selat Bali.
- Batas timur dengan Selat Lombok.

Provinsi Bali terbagi ke dalam delapan kabupaten dan satu kota meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar.

Di antara ke sembilan kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Buleleng tercatat memiliki luas wilayah terluas yaitu 1.364,73 km<sup>2</sup> (23,61%) dari luas provinsi Bali, diikuti oleh Tabanan 1.013,88 km<sup>2</sup> (17,54%), Jembrana 841,80 km<sup>2</sup> (14,56%), Karangasem 839,54 km<sup>2</sup> (14,52%), Bangli 490,71 km<sup>2</sup> (8,49%), Badung 418,62 km<sup>2</sup> (7,24%), Gianyar 368,00 km<sup>2</sup> (6,37%), Klungkung 315,00 km<sup>2</sup> (5,45%), dan Kota Denpasar 127,78 km<sup>2</sup> (2,21%) merupakan wilayah tersempit.

**Gambar 3.1. Persentase Luas Wilayah Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota, 2021**

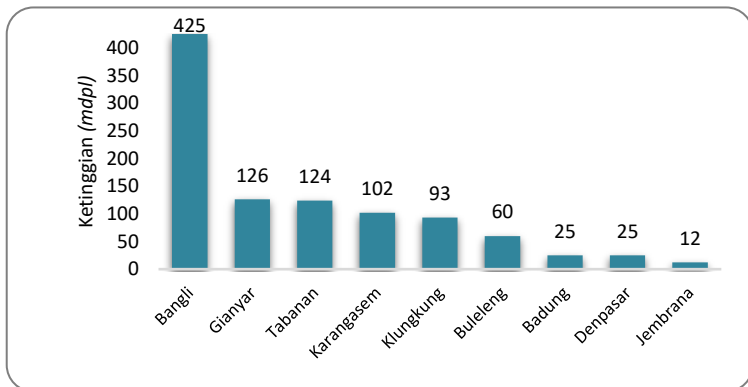


Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur, dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi, yakni Gunung Agung yang merupakan gunung tertinggi di Bali tercatat setinggi 3.142 meter. Sedangkan gunung yang tidak berapi antara lain Gunung Merbuk (1.356 meter) di Jembrana,

Gunung Patas (1.414 meter) di Buleleng, dan Gunung Seraya (1.058 meter) di Karangasem serta beberapa gunung lainnya.

Adanya pegunungan tersebut menyebabkan daerah Bali secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama, yakni Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai serta Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar (0-2%) tercatat seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15%) seluas 118.339 ha, lahan curam (15-40%) seluas 190.486 ha, dan lahan sangat curam (>40%) seluas 132.189 ha. Ibukota Kabupaten Bangli merupakan ibu kota yang memiliki ketinggian paling tinggi yaitu setinggi 425 meter dari permukaan laut. Sedangkan ibukota Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten dengan ketinggian paling rendah yaitu 12 meter dari permukaan laut. Selengkapnya tentang ketinggian Ibukota Kabupaten/Kota disajikan pada gambar 3.2.

**Gambar 3.2. Ketinggian Ibukota Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2021**



### 3.1.1 Kondisi Transportasi

Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan dan jembatan diperlukan demi memudahkan proses mobilisasi penduduk antar daerah dan menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa, utamanya untuk daerah-daerah sulit terjangkau. Jalan raya merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat yaitu sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Terkait dengan besaran harga barang dan jasa pada bidang konstruksi, selain ketersediaan barang/jasa (*supply*), kelancaran distribusi barang/jasa (konstruksi) ke suatu wilayah diduga memiliki pengaruh. Dengan demikian kondisi jalan menjadi salah satu syarat dalam pendistribusian barang ke suatu wilayah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pembentukan harga barang/jasa konstruksi tersebut. Data pada akhir tahun 2021 menunjukkan panjang jalan nasional di Bali tercatat sepanjang 629,39 km, jalan provinsi sepanjang 743,34 km, dan jalan kabupaten/kota sepanjang 7.312,60 km. Selengkapnya tentang panjang jalan menurut Kabupaten/Kota disajikan pada tabel 3.1.



**Tabel 3.1. Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan di Provinsi Bali, 2021**

Kabupaten/Kota	Jalan Nasional (km)	Jalan Provinsi (km)	Jalan Kabupaten (km)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Jembrana	72,63	29,52	1 075,93	13,56
2. Tabanan	65,73	136,68	863,22	12,27
3. Badung	63,61	61,58	673,37	9,19
4. Gianyar	64,33	85,74	515,24	7,66
5. Klungkung	37,72	9,34	453,80	5,77
6. Bangli	21,19	124,85	905,81	12,11
7. Karangasem	97,97	145,93	1 202,54	16,65
8. Buleleng	156,34	106,47	1 136,60	16,11
9. Denpasar	49,89	43,23	486,08	6,67
<b>Total</b>	<b>629,39</b>	<b>743,34</b>	<b>7 312,60</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali*

Dilihat dari kondisi jalannya, sebagian besar jalan di Provinsi Bali dalam kondisi baik (63,09%) yaitu sepanjang 5.479,97 km. Sementara jalan yang tergolong kondisi sedang tercatat sepanjang 1.661,37 km (19,13%), kondisi rusak tercatat sepanjang 978,35 km (11,26%), dan kondisi rusak berat tercatat sepanjang 565,64 km (6,51%). Selengkapnya tentang panjang jalan menurut kondisinya disajikan pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan dan Kondisi Jalan di Provinsi Bali, 2021**

Tingkat Kewenangan	Kondisi				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jalan Negara	251,48	370,02	7,58	0,31	629,39
Jalan Provinsi	436,26	151,09	154,19	1,80	743,34
Jalan Kabupaten/Kota	4 792,23	1 140,26	816,58	563,53	7 312,60
<b>Total</b>	<b>5 479,97</b>	<b>1 661,37</b>	<b>978,35</b>	<b>565,64</b>	<b>8 685,33</b>

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali*

Selain kondisi jalan, pembentukan harga barang/jasa konstruksi juga diduga dipengaruhi oleh jarak kabupaten/kota sebagai produsen/sumber barang/jasa menuju setiap lokasi pembangunan konstruksi di Bali. Jarak antar kabupaten/kota terjauh di Provinsi Bali adalah dari Kabupaten Karangasem menuju Kabupaten Jembrana yaitu sejauh 173 km (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali).

Moda transportasi laut juga menjadi sarana pendukung transportasi Provinsi Bali dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Akses barang masuk dari luar Provinsi Bali melalui tiga pelabuhan utama yaitu Benoa, Padangbai, dan Celukan Bawang. Dari ketiga pelabuhan tersebut, muat barang terbanyak tercatat di Pelabuhan Padang Bai sebanyak 284,23 ton sedangkan bongkar barang paling banyak tercatat di Pelabuhan Celukan Bawang sebanyak 662,24 ton (hasil Simoppel tahun 2021).

### 3.2 Dana Alokasi Umum Provinsi Bali

Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) bagi tiap daerah memiliki peran penting sebagai salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, serta dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya. Besaran DAU per Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3. Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)  
di Provinsi Bali, 2021**

Kabupaten/Kota	Alokasi (Dalam Ribuan Rupian)
(1)	(2)
1. Kabupaten Jembrana	530 846 915
2. Kabupaten Tabanan	770 968 153
3. Kabupaten Badung	338 522 304
4. Kabupaten Gianyar	658 741 795
5. Kabupaten Klungkung	510 642 255
6. Kabupaten Bangli	543 381 469
7. Kabupaten Karangasem	723 846 259
8. Kabupaten Buleleng	919 593 725
9. Kota Denpasar	629 908 879
<b>Total Provinsi Bali</b>	<b>1 241 266 313</b>

Sumber : <http://www.djpk.depkeu.go.id>

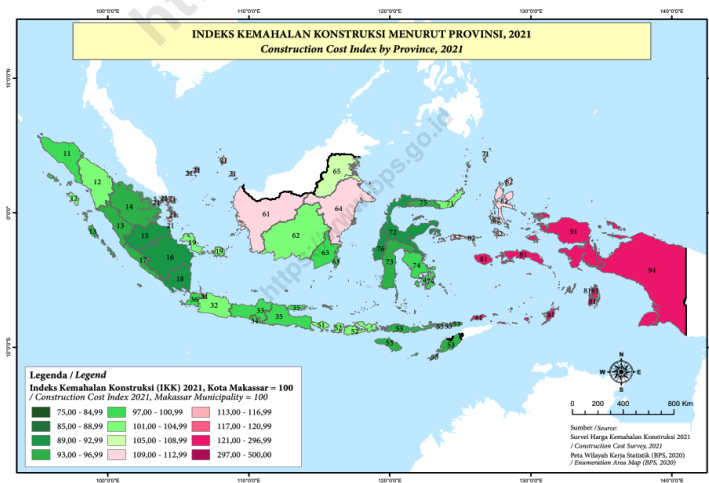
Kabupaten yang tercatat memperoleh DAU paling besar di Provinsi Bali adalah Kabupaten Buleleng dengan DAU sebesar 919,59 miliar rupiah, kemudian disusul Kabupaten Tabanan sebesar 770,97 miliar rupiah. Sedangkan kabupaten yang tercatat memperoleh DAU

paling rendah adalah Kabupaten Badung dengan DAU sebesar 338,52 miliar rupiah.

### 3.3 Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Bali

IKK merupakan indeks spasial yang digunakan untuk membandingkan tingkat harga/kemahalan bahan bangunan/jasa konstruksi di suatu daerah dibandingkan kota acuan. Semakin besar IKK menunjukkan semakin mahal harga bahan bangunan/konstruksi di wilayah tersebut dibandingkan dengan kota acuan. Harga bahan bangunan atau konstruksi, harga sewa alat berat, dan jasa konstruksi (upah tukang) di suatu daerah diduga dipengaruhi oleh letak geografis dan kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan bahan bangunan secara mandiri.

**Gambar 3.3. Peta Tematik Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2021**



Gambar 3.3. menunjukkan nilai IKK tahun 2021 menurut provinsi seluruh Indonesia. Seperti terlihat pada gambar bahwa nilai IKK Provinsi Bali tercatat sebesar 103,17. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kemahalan harga barang/jasa konstruksi di wilayah Provinsi Bali secara rata-rata 3,17 persen lebih mahal dibandingkan dengan kota acuan (Kota Makassar). Jika dilihat dari besaran IKK-nya, rata-rata IKK di Provinsi Bali relatif lebih tinggi dibanding nilai IKK provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa. Hal ini diduga karena sebagian barang konstruksi didatangkan dari pulau Jawa terutama barang hasil industri/pabrikasi. Sebagian barang lainnya seperti batu bata, batako, dan barang-barang natura (pasir, kerikil, dan lainnya) dihasilkan di Provinsi Bali. Namun dikarenakan adanya penutupan sejumlah usaha galian C di Kabupaten Karangasem (Perda Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2012), jumlah produksi barang-barang natural itu pun semakin sedikit sehingga mendorong peningkatan harga barang-barang natural tersebut.

Pada tahun 2021, IKK tertinggi tercatat di Provinsi Papua yaitu sebesar 207,11 sedangkan IKK terendah tercatat di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 90,50. Jika diurutkan dari nilai IKK tertinggi, Provinsi Bali menduduki urutan ke-11 dari 34 Provinsi di Indonesia. Sementara, jika dilihat menurut kawasannya, IKK Provinsi Bali menempati urutan kedua setelah DKI Jakarta diantara 9 provinsi yang ada di kawasan wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra).

**Gambar 3.4. Nilai dan Ranking Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Bali, 2017-2021**



\*) Kota Acuan Surabaya

\*\*\*) Kota Acuan Semarang

\*\*\*) Kota Acuan Makassar

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, besaran nilai dan ranking IKK Provinsi Bali tahun 2021 terhitung rendah. Hal ini mengisyaratkan perubahan harga barang/jasa konstruksi di Provinsi Bali relatif lebih cepat dibandingkan besaran perubahan harga di kota acuan (Kota Makassar). Karena merupakan indeks spasial, kenaikan atau penurunan nilai IKK tidak serta merta menunjukkan kenaikan/penurunan harga barang/jasa konstruksi di wilayah tersebut. Kenaikan IKK antar tahun hanya menunjukkan kecepatan kenaikan harga barang/jasa konstruksi di suatu wilayah lebih tinggi dibandingkan kecepatan kenaikan harga barang/jasa konstruksi di kota acuan.

### 3.4 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota

Selain menghitung IKK Provinsi, BPS juga menghitung 514 IKK Kabupaten/Kota. Kabupaten/kota yang tercatat memiliki nilai

IKK paling tinggi yaitu Kabupaten Puncak dengan IKK sebesar 478,12 kemudian disusul Kabupaten Intan Jaya sebesar 447,97 serta Kabupaten Puncak Jaya sebesar 446,40. Ketiga kabupaten tersebut terletak di Provinsi Papua. Nilai IKK terendah tercatat di Kabupaten Malaka (Nusa Tenggara Timur) sebesar 81,00 kemudian disusul Kota Palu (Sulawesi Tengah) sebesar 81,17; serta Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat) sebesar 81,41.

Provinsi Bali yang terdiri dari 9 Kabupaten/Kota, nilai IKK tertinggi pada tahun 2021 tercatat di Kota Denpasar yaitu sebesar 106,80, kemudian disusul Kabupaten Badung sebesar 106,58 dan Kabupaten Klungkung sebesar 106,57. Sementara itu, IKK terendah tercatat di Kabupaten Gianyar sebesar 97,44. Selengkapnya tentang IKK Kabupaten/Kota se Provinsi Bali Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.4.

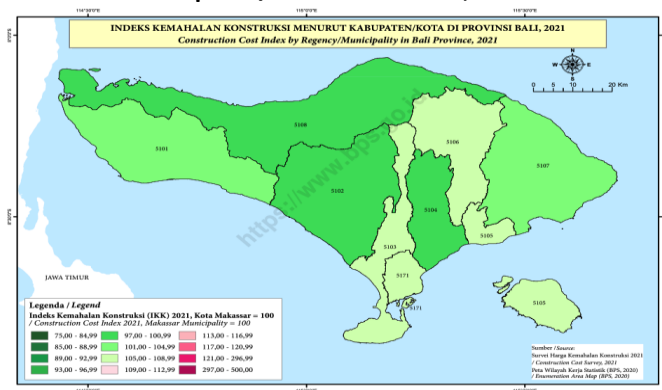
**Tabel 3.4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2021**

Kabupaten/Kota	IKK	Ranking
(1)	(2)	(3)
1. Kabupaten Jembrana	103,86	5
2. Kabupaten Tabanan	99,21	8
3. Kabupaten Badung	106,58	2
4. Kabupaten Gianyar	97,44	9
5. Kabupaten Klungkung	106,57	3
6. Kabupaten Bangli	106,29	4
7. Kabupaten Karangasem	101,91	6
8. Kabupaten Buleleng	100,39	7
9. Kota Denpasar	106,80	1
<b>Provinsi Bali</b>	<b>103,17</b>	

Nilai IKK Kota Denpasar sebesar 106,80 menunjukkan tingkat kemahalan barang/jasa konstruksi di Kota Denpasar 6,8 persen lebih mahal dari kota acuan (Kota Makassar). Dengan kata lain, jika untuk membangun sebuah gedung di Kota Makassar dibutuhkan biaya 100 miliar rupiah, maka gedung yang sama dibangun di Kota Denpasar akan memerlukan biaya sebesar 106,8 miliar rupiah.

Sementara itu, nilai IKK Kabupaten Gianyar sebesar 97,44 menunjukkan bahwa jika untuk membangun sebuah gedung di Kota Makassar dibutuhkan biaya 100 miliar rupiah, maka gedung yang sama dibangun di Kabupaten Gianyar akan memerlukan biaya sebesar 97,44 miliar rupiah. IKK Kabupaten Gianyar yang paling rendah di Provinsi Bali diduga karena akses transportasi ke ibukota provinsi yang lebih singkat dan mudah serta upah untuk membayar tenaga kerja sektor konstruksi di Kabupaten Gianyar yang lebih murah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Bali.

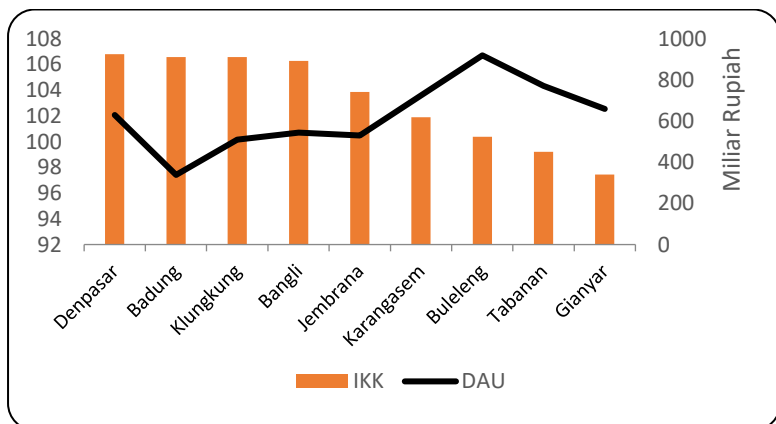
**Gambar 3.5. Peta Tematik Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 2021**





Seperti disampaikan pada bagian sebelumnya, IKK merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam penghitungan DAU, sehingga perolehan DAU masing-masing kabupaten/kota di Bali akan sejalan dengan nilai IKK-nya, kecuali ada kondisi khusus. Alokasi DAU paling besar tercatat di Kabupaten Buleleng yaitu sebesar 919,59 miliar rupiah. Hal ini sejalan dengan besaran nilai IKK Kabupaten Buleleng yang relatif tinggi dibanding beberapa Kabupaten/Kota lainnya juga hasil perhitungan nilai variabel penyusun DAU lainnya. Kabupaten Badung dengan nilai IKK sebesar 106,58 atau peringkat ke-2 dari 9 kabupaten/kota di Bali tercatat memperoleh DAU paling kecil yaitu 338,52 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung yang cukup besar sehingga memiliki indeks kemandirian fiskal yang relatif tinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali.

**Gambar 3.6. Indeks Kemahalan Konstruksi dan Dana Alokasi Umum Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2021**







# LAMPIRAN



**Tabel 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2017  
(Kota Surabaya = 100)**

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	96,41
2	1200	Sumatera Utara	101,49
3	1300	Sumatera Barat	95,33
4	1400	Riau	94,73
5	1500	Jambi	88,39
6	1600	Sumatera Selatan	98,64
7	1700	Bengkulu	93,27
8	1800	Lampung	90,09
9	1900	Bangka Belitung	101,71
10	2100	Kepulauan Riau	122,72
11	3100	DKI Jakarta	117,57
12	3200	Jawa Barat	96,78
13	3300	Jawa Tengah	93,05
14	3400	DI Yogyakarta	92,52
15	3500	Jawa Timur	97,50
16	3600	Banten	97,88
<b>17</b>	<b>5100</b>	<b>Bali</b>	<b>111,64</b>
18	5200	Nusa Tenggara Barat	91,63
19	5300	Nusa Tenggara Timur	95,94
20	6100	Kalimantan Barat	109,12
21	6200	Kalimantan Tengah	97,47
22	6300	Kalimantan Selatan	101,67
23	6400	Kalimantan Timur	109,21
24	6500	Kalimantan Utara	118,27
25	7100	Sulawesi Utara	112,05
26	7200	Sulawesi Tengah	88,13
27	7300	Sulawesi Selatan	95,57
28	7400	Sulawesi Tenggara	99,75
29	7500	Gorontalo	92,76
30	7600	Sulawesi Barat	88,61
31	8100	Maluku	121,06
32	8200	Maluku Utara	120,92
33	9100	Papua Barat	140,04
34	9400	Papua	229,82

**Tabel 2. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2018  
(Kota Semarang = 100)**

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	100,39
2	1200	Sumatera Utara	101,47
3	1300	Sumatera Barat	99,10
4	1400	Riau	96,86
5	1500	Jambi	92,53
6	1600	Sumatera Selatan	97,64
7	1700	Bengkulu	96,76
8	1800	Lampung	89,31
9	1900	Bangka Belitung	99,29
10	2100	Kepulauan Riau	127,70
11	3100	DKI Jakarta	109,14
12	3200	Jawa Barat	103,63
13	3300	Jawa Tengah	98,64
14	3400	DI Yogyakarta	104,88
15	3500	Jawa Timur	103,86
16	3600	Banten	100,22
<b>17</b>	<b>5100</b>	<b>Bali</b>	<b>122,95</b>
18	5200	Nusa Tenggara Barat	100,76
19	5300	Nusa Tenggara Timur	99,79
20	6100	Kalimantan Barat	113,95
21	6200	Kalimantan Tengah	102,31
22	6300	Kalimantan Selatan	105,09
23	6400	Kalimantan Timur	114,31
24	6500	Kalimantan Utara	113,25
25	7100	Sulawesi Utara	110,83
26	7200	Sulawesi Tengah	97,04
27	7300	Sulawesi Selatan	101,69
28	7400	Sulawesi Tenggara	101,96
29	7500	Gorontalo	96,46
30	7600	Sulawesi Barat	91,33
31	8100	Maluku	126,39
32	8200	Maluku Utara	116,55
33	9100	Papua Barat	134,02
34	9400	Papua	227,90

**Tabel 3. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2019  
(Kota Semarang = 100)**

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	98,68
2	1200	Sumatera Utara	102,79
3	1300	Sumatera Barat	93,72
4	1400	Riau	94,92
5	1500	Jambi	94,38
6	1600	Sumatera Selatan	94,50
7	1700	Bengkulu	94,74
8	1800	Lampung	88,84
9	1900	Bangka Belitung	101,27
10	2100	Kepulauan Riau	128,34
11	3100	DKI Jakarta	114,06
12	3200	Jawa Barat	103,03
13	3300	Jawa Tengah	99,93
14	3400	DI Yogyakarta	103,42
15	3500	Jawa Timur	103,68
16	3600	Banten	95,84
<b>17</b>	<b>5100</b>	<b>Bali</b>	<b>119,10</b>
18	5200	Nusa Tenggara Barat	98,76
19	5300	Nusa Tenggara Timur	99,03
20	6100	Kalimantan Barat	111,53
21	6200	Kalimantan Tengah	101,90
22	6300	Kalimantan Selatan	100,90
23	6400	Kalimantan Timur	114,37
24	6500	Kalimantan Utara	112,11
25	7100	Sulawesi Utara	108,32
26	7200	Sulawesi Tengah	91,98
27	7300	Sulawesi Selatan	97,34
28	7400	Sulawesi Tenggara	101,45
29	7500	Gorontalo	97,45
30	7600	Sulawesi Barat	92,27
31	8100	Maluku	123,02
32	8200	Maluku Utara	119,11
33	9100	Papua Barat	132,67
34	9400	Papua	218,59

**Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2020  
(Kota Semarang = 100)**

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	96,38
2	1200	Sumatera Utara	99,84
3	1300	Sumatera Barat	92,96
4	1400	Riau	95,72
5	1500	Jambi	90,35
6	1600	Sumatera Selatan	92,69
7	1700	Bengkulu	91,78
8	1800	Lampung	88,67
9	1900	Bangka Belitung	101,90
10	2100	Kepulauan Riau	121,50
11	3100	DKI Jakarta	116,84
12	3200	Jawa Barat	103,93
13	3300	Jawa Tengah	97,31
14	3400	DI Yogyakarta	102,29
15	3500	Jawa Timur	102,44
16	3600	Banten	97,05
<b>17</b>	<b>5100</b>	<b>Bali</b>	<b>115,04</b>
18	5200	Nusa Tenggara Barat	99,13
19	5300	Nusa Tenggara Timur	97,95
20	6100	Kalimantan Barat	110,92
21	6200	Kalimantan Tengah	99,55
22	6300	Kalimantan Selatan	100,32
23	6400	Kalimantan Timur	109,69
24	6500	Kalimantan Utara	109,90
25	7100	Sulawesi Utara	104,11
26	7200	Sulawesi Tengah	90,74
27	7300	Sulawesi Selatan	95,11
28	7400	Sulawesi Tenggara	101,09
29	7500	Gorontalo	94,12
30	7600	Sulawesi Barat	89,48
31	8100	Maluku	124,38
32	8200	Maluku Utara	120,52
33	9100	Papua Barat	129,66
34	9400	Papua	208,90



**Tabel 5. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi, 2021  
(Kota Makassar = 100)**

No	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1100	Aceh	99,03
2	1200	Sumatera Utara	101,63
3	1300	Sumatera Barat	94,77
4	1400	Riau	94,85
5	1500	Jambi	92,76
6	1600	Sumatera Selatan	91,58
7	1700	Bengkulu	94,42
8	1800	Lampung	92,57
9	1900	Bangka Belitung	101,21
10	2100	Kepulauan Riau	116,80
11	3100	DKI Jakarta	121,42
12	3200	Jawa Barat	102,60
13	3300	Jawa Tengah	97,65
14	3400	DI Yogyakarta	100,31
15	3500	Jawa Timur	100,80
16	3600	Banten	97,64
<b>17</b>	<b>5100</b>	<b>Bali</b>	<b>103,17</b>
18	5200	Nusa Tenggara Barat	101,93
19	5300	Nusa Tenggara Timur	93,58
20	6100	Kalimantan Barat	111,45
21	6200	Kalimantan Tengah	101,47
22	6300	Kalimantan Selatan	99,25
23	6400	Kalimantan Timur	109,81
24	6500	Kalimantan Utara	106,00
25	7100	Sulawesi Utara	104,43
26	7200	Sulawesi Tengah	90,50
27	7300	Sulawesi Selatan	96,84
28	7400	Sulawesi Tenggara	99,38
29	7500	Gorontalo	95,07
30	7600	Sulawesi Barat	90,72
31	8100	Maluku	124,61
32	8200	Maluku Utara	112,31
33	9100	Papua Barat	130,59
34	9400	Papua	207,11

**Tabel 6. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2017  
Provinsi Bali (Kota Surabaya = 100)**

<b>No</b>	<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>IKK</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5101	Jembrana	112,93
2	5102	Tabanan	116,36
3	5103	Badung	114,54
4	5104	Gianyar	112,40
5	5105	Klungkung	101,40
6	5106	Bangli	111,63
7	5107	Karangasem	106,66
8	5108	Buleleng	118,47
9	5171	Denpasar	111,37

**Tabel 7. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2018  
Provinsi Bali (Kota Semarang = 100)**

<b>No</b>	<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>IKK</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5101	Jembrana	124,74
2	5102	Tabanan	126,12
3	5103	Badung	126,35
4	5104	Gianyar	120,51
5	5105	Klungkung	112,33
6	5106	Bangli	121,72
7	5107	Karangasem	121,49
8	5108	Buleleng	129,70
9	5171	Denpasar	124,46

**Tabel 8. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2019  
Provinsi Bali (Kota Semarang = 100)**

<b>No</b>	<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>IKK</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5101	Jembrana	126,59
2	5102	Tabanan	122,39
3	5103	Badung	126,12
4	5104	Gianyar	114,65
5	5105	Klungkung	110,16
6	5106	Bangli	116,52
7	5107	Karangasem	118,29
8	5108	Buleleng	119,88
9	5171	Denpasar	118,25

**Tabel 9. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2020  
Provinsi Bali (Kota Semarang = 100)**

<b>No</b>	<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>IKK</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5101	Jembrana	122,49
2	5102	Tabanan	116,18
3	5103	Badung	121,15
4	5104	Gianyar	105,10
5	5105	Klungkung	111,95
6	5106	Bangli	113,99
7	5107	Karangasem	110,22
8	5108	Buleleng	115,94
9	5171	Denpasar	119,42

**Tabel 10. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2021  
Provinsi Bali (Kota Makassar = 100)**

<b>No</b>	<b>Kode</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>IKK</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	5101	Jembrana	103,86
2	5102	Tabanan	99,21
3	5103	Badung	106,58
4	5104	Gianyar	97,44
5	5105	Klungkung	106,57
6	5106	Bangli	106,29
7	5107	Karangasem	101,91
8	5108	Buleleng	100,39
9	5171	Denpasar	106,80



# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<http://bali.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BALI**

Jl. Raya Puputan No.1 Renon Denpasar 80226

Telp. (0361) 238159, Fax. (0361) 238162

Email : [bps5100@bps.go.id](mailto:bps5100@bps.go.id)

Homepage : <http://bali.bps.go.id>

ISSN 2797-264X

